

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B

➤ VISI

TERWUJUDNYA LEMBAGA
PERADILAN AGAMA MAROS
KELAS I.B YANG AGUNG



Jl. Jend. Sudirman No.9 Turikale - Maros

0411-371137

www.pa-maros.go.id

admin@pa-maros.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah terucap hanya kepada Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunianya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Maros Tahun 2020 mampu kami selesaikan sesuai waktu dan ketentuan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Maros Tahun 2020 ini disusun untuk memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/12/2019 Tanggal 27 Nopember 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan hasil implementasi dan realisasi (secara kualitatif maupun kuantitatif) terhadap seluruh program dan kegiatan Pengadilan Agama Maros selama kurun waktu tahun 2020 Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga merupakan gambaran secara utuh, komprehensif dan transparan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Maros sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *good governance, clean and clear*.

Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini belum menghasilkan sesuatu yang sempurna, baik ditinjau dari aspek substansinya, redaksional maupun dari sisi tampilannya. Oleh karena itu, masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif kami sangat harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini di masa-masa yang akan datang.

Selanjutnya, kepada semua pihak (internal/eksternal) yang ikut berperan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, kami ucapkan dan sampaikan apresiasi, terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga karya dan pengabdian kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.



Maros, 6 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Maros


Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	4
BAB II A. Keadaan Perkara	7
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. Penyelesaian Perkara	9
1. Jumlah sisa perkara yang diputus	10
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	10
3. Jumlah perkara tidak Banding, Kasasi, dan PK	10
4. Jumlah perkara yang berhasil di Mediasi	10
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	11
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	11
2. Sidang Keliling/Sidang Terpadu	11
3. Perkara Prodeo	12
BAB III Sumber Daya Manusia	13
1. Mutasi	15
2. Promosi	16
3. Pensiun	17
4. Diklat (SDM Teknis/nonteknis)	17
BAB IV Keuangan, Sarana Prasarana, Teknologi Informasi	18
A. Pengelolaan Keuangan	18
B. Pengelolaan Sarana dan prasarana	24
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	25
1. Implementasi <i>e-court</i>	25
2. Implementasi SIPP.....	26
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	29
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	29
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	30
3. Inovasi Pelayanan Publik	30
BAB IV Pengawasan	
A. Internal	32
B. Evaluasi	34
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	37
B. Rekomendasi	38

BAB I PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu perwujudan dari sebuah negara hukum, sehingga dalam proses bernegara tersebut sangatlah berpedoman kepada hal-hal yang sifatnya akuntabel. Hal tersebut berarti bahwa setiap lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada setiap akhir tahun harus memberikan pertanggungjawaban kepada negara, baik secara formil maupun materil, tidak terkecuali Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Agama Maros Kelas IB sebagai salah satu entitas terbawah dari lembaga yudikatif Mahkamah Agung RI.

Proses peradilan dengan azas “cepat, sederhana, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah menjadi landasan utama lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak terkecuali lembaga peradilan agama, termasuk Pengadilan



Agama Maros Kelas IB.

Pengadilan Agama Maros, sebagai salah satu garda terdepan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi “**Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Maros**

Kelas IB Yang Agung, dimana Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk Misi, yaitu:

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maros;**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;**
- 3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Maros;**
- 4. Meningkatkan Kinerja Pengadilan Agama Maros yang Berbasis Teknologi Informasi.**

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, adalah merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003, yang selanjutnya sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kemenpan dan RB.

Reformasi birokrasi telah dilakukan di Pengadilan Agama Maros, baik terhadap tata kelola keperkaraan maupun administrasi umum, namun tidak bisa di pungkiri masih terdapat kelemahan di berbagai sisi sebagai akibat dari hal-hal yang sifatnya manajemen-sistemik. pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Maros, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Maros, menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Maros.

Pengadilan Agama Maros, dalam kurun waktu Tahun 2020, telah banyak melakukan perubahan-perubahan dan bahkan pembaharuan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengelolaan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengelolaan/penanganan administrasi umum, yang hampir semuanya berbasis Teknologi Informasi (IT) dengan menggunakan berbagai aplikasi (komputerisasi), dengan tetap berpegang pada nilai-nilai proporsional, professional, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan termasuk masyarakat yang kurang mampu, maka pada tahun 2020 Pengadilan Agama Maros telah menjalankan program berperkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi, layanan Posbakum bagi masyarakat yang kurang memahami hukum, serta sidang diluar gedung pengadilan untuk menjangkau desa/kelurahan yang secara geografis dan transportasi sulit dan

mahal, yang semuanya dibiayai oleh APBN TA. 20209 dengan berorientasi pada terlaksananya pelayanan hukum yang mudah, murah, serta berkeadilan, termasuk juga adanya sistem informasi perkara (SIPP) dan lain-lain.

Persentase kinerja bidang pelayanan teknis yustisial Pengadilan Agama Maros Kelas IB, pada tahun 2020 terjadi kenaikan volume perkara yang masuk, yaitu 1150 perkara, dan sisa perkara tahun 2019 sejumlah 24 perkara, sehingga total perkara yang masuk tahun 2020 adalah 1174 perkara. Dari total Perkara tersebut, yang di selesaikan sejumlah 1137 perkara, atau 96,8 %, sehingga sisa perkara tahun 2020 adalah 37 perkara (3,2%). Dari persentase perkara tersebut, tentunya membutuhkan energi lebih bagi seluruh entitas Pengadilan Agama Maros untuk senantiasa meningkatkan kinerja yang kualitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing, mau dan berani melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya kompetitif.

Dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama Maros Kelas IB mempunyai wilayah yurisdiksi, sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Mandai | 8. Kecamatan Turikale |
| 2. Kecamatan Moncongloe | 9. Kecamatan Lau |
| 3. Kecamatan Maros Baru | 10. Kecamatan Camba |
| 4. Kecamatan Bantimurung | 11. Kecamatan Tompobulu |
| 5. Kecamatan Simbang | 12. Kecamatan Cenrana |
| 6. Kecamatan Tanralili | 13. Kecamatan Bontoa |
| 7. Kecamatan Marusu | 14. Kecamatan Mallawa |



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maros

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama tahun 2020 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak, dengan penyebabnya di dominasi oleh masalah ekonomi dan sosial.

Pengadilan Agama Maros Kelas IB, selama tahun 2020 melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita, secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu 2020. Secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Maros Kelas IB tahun 2020, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Presentase Perkara Tingkat Pertama Tahun 2020 (termasuk sisa tahun 2019)

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	1	-	1
2	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
3	Cerai Talak	160	149	11
4	Cerai Gugat	497	481	16
5	Harta Bersama	7	5	2
6	Penguasaan Anak	3	2	1
7	Perwalian	4	4	-
8	Asal Usul Anak	1	1	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-
10	Itsbat Nikah	225	224	1
11	Dispensasi Nikah	237	235	2
12	Wali Adhal	4	4	-
13	Ekonomi Syari'ah	2	2	-
14	Kewarisan	5	4	1
15	Penetapan Ahli Waris	26	24	2
16	Lain-lain	1	1	-
J u m l a h		1174	1137	37

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara di tingkat Banding lebih di dominasi oleh perkara kewarisan, dan cerai gugat. Selama tahun 2020 perkara Banding yang masuk di Pengadilan Agama adalah sejumlah 6 perkara. Adapun keadaan perkara tingkat Banding seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Presentase Perkara Tingkat Banding
Tahun 2020 (termasuk sisa tahun 2019)**

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
3	Cerai Talak	-	-	-
4	Cerai Gugat	2	-	2
5	Harta Bersama	1	-	1
6	Penguasaan Anak	1	1	-
7	Perwalian	-	-	-
8	Asal Usul Anak	-	-	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-
10	Itsbat Nikah	-	-	-
11	Dispensasi Nikah	-	-	-
12	Wali Adhal	-	-	-
13	Ekonomi Syari'ah	-	-	-
14	Kewarisan	1	1	-
15	Penetapan Ahli Waris	-	-	-
16	Lain-lain	1	1	-
J u m l a h		6	3	3

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama tahun 2020 menerima perkara Kasasi sejumlah 2 perkara. Hal ini terlihat pada tabel dibawah ini:

**Presentase Perkara Tingkat Kasasi
Tahun 2020 (termasuk sisa tahun 2019)**

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
3	Cerai Talak	-	-	-
4	Cerai Gugat	-	-	-
5	Harta Bersama	-	-	-
6	Penguasaan Anak	-	-	-
7	Perwalian	-	-	-
8	Asal Usul Anak	-	-	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-

10	Itsbat Nikah	-	-	-
11	Dispensasi Nikah	-	-	-
12	Wali Adhal	-	-	-
13	Ekonomi Syari'ah	-	-	-
14	Kewarisan	1	-	1
15	Penetapan Ahli Waris	-	-	-
16	Lain-lain	1	-	1
J u m l a h		2	-	2

4. Keadan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara ditingkat Peninjauan Kembali tahun 2020 adalah nihil, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Presentase Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2020 (termasuk sisa tahun 2019)

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
3	Cerai Talak	-	-	-
4	Cerai Gugat	-	-	-
5	Harta Bersama	-	-	-
6	Penguasaan Anak	-	-	-
7	Perwalian	-	-	-
8	Asal Usul Anak	-	-	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-
10	Itsbat Nikah	-	-	-
11	Dispensasi Nikah	-	-	-
12	Wali Adhal	-	-	-
13	Ekonomi Syari'ah	-	-	-
14	Kewarisan	-	-	-
15	Penetapan Ahli Waris	-	-	-
16	Lain-lain	-	-	-
J u m l a h		-	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Perkara yang masuk tahun 2020 di Pengadilan Agama Maros Kelas IB sejumlah 1150 perkara, sisa perkara tahun 2019 sejumlah 24 perkara, sehingga total perkara masuk selama kurun waktu 2020 adalah sejumlah 1174 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang berhasil diputus/diselesaikan sejumlah 1137

perkara atau 96,8 %, sehingga sisa perkara tahun 2020 sejumlah 37 perkara atau 3,2 %.

Berdasarkan keadaan perkara tersebut, bahwa jumlah perkara yang masuk antara tahun 2019 dan 2020 dari sisi kuantitas ada kenaikan, namun penyelesaian perkara secara presentase turun sekitar 0,8 %.

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus tepat waktu tahun 2020, yaitu perkara yang diputus dibawah jangka waktu 5 bulan adalah sejumlah 1137 perkara, sedangkan yang diputus diatas 5 bulan adalah nihil, tidak ada.

3. Jumlah Perkara yang Tidak Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Perkara yang putus dan telah berkekuatan hukum tetap (*incrach*) di Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama tahun 2020, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK adalah sejumlah 1127 perkara. Artinya ada 10 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

4. Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi

Jumlah perkara yang berhasil di Mediasi tahun 2020 di Pengadilan Agama Maros Kelas IB adalah sejumlah 91 perkara, yaitu yang berhasil di Mediasi sejumlah 9 perkara, tidak berhasil 80 perkara, dan masih dalam proses Mediasi sejumlah 2 perkara. Pada umumnya pihak-pihak yang berhasil di Mediasi karena masih adanya kesadaran diri dari pihak-pihak yang berperkara setelah mendengar masukan/ pandangan dari para Hakim Mediator.

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan terkait dengan kompetensi mengadili oleh Pengadilan Agama Maros Kelas IB, maka untuk perkara anak yang berhasil melalui Diversi adalah nihil.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Agama Maros telah berupaya melakukan berbagai bentuk pelayanan formal administrasi maupun konkrit/sarana dan prasarana) Penjaminan Mutu (APM). Dan Mutu Pengadilan Agama Maros mendapat nilai “A Excellent”, setelah di tahun sebelumnya 2019 mendapat nilai yang sama, yaitu “A Excellent”.



Kelas IB di tahun 2020 penataan dan peningkatan publik (baik secara implementasi sesuai standar Akreditasi Akreditasi Penjaminan Kelas IB pada tahun 2020

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Agama Maros 2020 melaksanakan layanan Pos (Posbakum), dan layanan APBN TA. 2020 melalui DIPA Agung RI. Selama kurun waktu hukum telah melaksanakan



Kelas IB pada tahun Bantuan Hukum tersebut di biyai oleh (04) Badilag Mahkamah tahun 2020, Pos bantuan kewajibannya di bidang

pelayanan hukum kepada masyarakat/pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros Kelas IB. Layanan Posbakum dengan jumlah layanan 407 jam. Pagu anggaran untuk Posbakum TA. 2020 adalah Rp. 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*), dengan realisasi 100 %, yaitu Rp. 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*),

2. Sidang Keliling

Pengadilan tahun 2020 sidang keliling, Rp. 25.000.000,-



Agama Maros Kelas IB pada mendapatkan anggaran kegiatan dengan Pagu anggaran sejumlah (*Dua puluh lima juta rupiah*),

dengan realisasi sejumlah 24.400.000,- (*Dua puluh empat juta empat ratus ribu*

rupiah) atau sekitar 97,6 %, sehingga ada sisa anggaran sejumlah Rp. 600.000,- (*Enam rtaus ribu rupiah*). Sidang keliling tersebut dilaksanakan sebanyak 17 kali kegiatan, dengan jumlah perkara 44 perkara.

3. Perkara Prodeo

Tahun 2020, Pengadilan Agama Maros Kelas IB mendapatkan anggaran kegiatan prodeo, dengan Pagu anggaran sejumlah Rp. 3.910.000,- (*Tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh*), dan terealisasi 100 %. Selama tahun 2020, perkara Prodeo dilaksanakan dan di realisasikan kepada 10 (sepuluh) Perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Maros Kelas IB sampai tanggal 31 Desember 2020 adalah berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang. Dari jumlah tersebut, Hakim sebanyak 11 (sebelas) orang, 16 orang Kepaniteraan, 5 orang Kejurusitaan, 6 orang Kesekretariatan Staf. Selengkapnya Nampak dalam tabel dibawah ini :

Daftar Pejabat dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama MARos Kelas IB Tahun 2019

NO	N A M A	NIP	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Sahrul Fahmi, M.H.	19680910.199403.1.016	Ketua	S2 Ilmu Hukum
2	Nahrudin, S.Ag.	19731105.200003.1.001	Wakil Ketua	S1 Ilmu Agama Islam
3	Dr. H. Sukri Hc, M.H.	19670412.199303.1.012	Hakim	S3 Ilmu Hukum
4	Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.	19561231.198503.1.029	Hakim	S2 Ilmu Hukum
5	Dra. Hj. St. Masdanah	19591030.198903.2.001	Hakim	S2 Ilmu Hukum
6	Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.	19840909.201101.1.017	Hakim	S2 Ilmu Hukum
7	Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.	19800504.200312.1.002	Hakim	S2 Ilmu Hukum
8	Dra. Sitti Johar, M.H.	19660721.199403.2.002	Hakim	S2 Ilmu Hukum
9	Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.	19780504.200212.2.003	Hakim	S1 Ilmu Hukum Islam
10	Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.	19651005.198503.2.003	Hakim	S2 Ilmu Hukum
11	Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.	19621231.199303.1.036	Hakim	S2 Ilmu Hukum
12	Drs. M. Idris, S.H., M.H.	19641231.199403.1.050	Panitera	S2 Ilmu Hukum
13	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.	19730406.199903.1.003	Sekretaris	S3 Hukum
14	Nur Rahma Baharuddin, S.SI.	19841213.200805.2.001	Ka. Subbag Kepeg, Organisasi dan Tata Laksana	S1 Sistem Informasi
15	Sitti Harsani, S.Kom.	19790701.200904.2.004	Ka.Subbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	S1 Ilmu Komputer
16	Mukarramah, S.H.I.	19841104.200904.2.009	Ka. Subbag Umum dan Keuangan	S1 Hukum Islam
17	Hj. St. Munirah D., S.H.I.	19641010.198401.2.001	Panitera Muda Gugatan	S1 Ilmu Hukum Islam
18	Muhammad Ridwan , S.H.	19900518.201212.1.004	Panitera Muda Permohonan	S1 Ilmu Hukum
19	H. Mas'ud Taiyep	19610421.198003.1.001	Panitera Muda Hukum	SMA
20	Hj. Marlina, S.H.	19611231.199403.2.007	Panitera Pengganti	S1 Ilmu Hukum
21	Surahmawati M., S.H.	19851128.200805.2.001	Panitera Pengganti	S1 Ilmu Hukum

22	Nur Qalbi Patawari, S. Ag.	19711220.199202.2.001	Panitera Pengganti	S1 Hukum Islam
23	Dra. Hj. Mushayati	19661205.199402.2.001	Panitera Pengganti	S1
24	Sarawaty Fahriyah Arsyad, S. Ag.	19740311.200012.2.001	Panitera Pengganti	S1 Ilmu Agama Islam
25	Dra. Haerana	19630118.199003.2.001	Panitera Pengganti	S1
26	Syarifuddin L.	19630907.198402.1.001	Panitera Pengganti	SMA
27	Nur Uliya Arif, S.H., M.H.	19810106.200912.2.002	Panitera Pengganti	S2 Ilmu Hukum
28	Saufa Jamila, S.H.	19780607.200904.2.003	Panitera Pengganti	S1 Ilmu Hukum
29	Atirah, S.Ag., M.H.	19700617.200312.2.001	Panitera Pengganti	S2 Ilmu Hukum
30	Nurwati, S.H.	19720203.199503.2.001	Panitera Pengganti	S1 Ilmu Hukum
31	Muhammad Arfah, S.H.	19691217.200012.1.001	Panitera Pengganti	S1 Ilmu Hukum
31	Fachrul Islam Yusuf	19830816.200604.1.002	Juru Sita	S1 Hukum Islam
33	Ramdan Mawardi, S.Sos.I.	19750914.200912.1.003	Juru Sita	S1 Ilmu Sosial
34	Rima Arisanty	19780327.200904.2.005	Juru Sita	SMA
35	Muhammad Anwar, S. Ag.	19630817.198703.1.001	Juru Sita	S1 Ilmu Agama Islam
36	Nurmala Sari, S.H.I.	19820207.201101.2.010	Jurusita Pengganti	S1 Hukum Islam
37	Muhammad Arsyuddin, S.Pi.	19730103.200604.1.003	Penyusun Laporan Keuangan	S1 Perikanan
38	A. Muhammad Aslam	19831120.201508.1.001	Pengelola Kepegawaian	S1 Ilmu Hukum

Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama kurun waktu 2020 juga mempekerjakan tenaga honorer sejumlah 9 (sembilan) orang yang ditanggung DIPA, yaitu 5 orang Pramubakti, 2 Orang Sopir dan 2 orang tenaga Satuan Pengamanan (Satpam).

Daftar Tenaga Honorer Pengadilan Agama Maros Kelas IB Tahun 2020

NO	N A M A	NIP	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Hasruddin, S.HI	-		S1 Hukum Islam
2	Magfirah, SHI.	-	Staf, Panmud Hukum	S1 Hukum Islam
3	Zainuddin	-	Sekuriti	SMA
4	Arifuddin, S.Kom	-	Staf TI	S1 Ilmu Komputer
5	Supriadi	-	Driver	SMA
6	Hamdani, S.HI	-	Staf Panmud Hukum	S1 Ilmu Hukum
7	Baharuddin Talibe	-	Sekuriti	SMA
8	Muhammad Nasrul, S.E	-	Driver	S1 Ilmu Ekonomi
9	Fadliah Nisa Marsya, S.HI	-	Staf Kepeg & Ortala	S1 Ilmu Hukum

- Periode April 2020

NO	NAMA	NIP	MUTASI GOL	JABATAN	JENIS	KET
1	2		3	4	5	6
1	Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.	19621231.1993 03.1.036	IV/b ke IV/c	Hakim	reguler	selesai
2	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.	19730406.1999 03.1.003	IV/a ke IV/b	Sekretaris	reguler	selesai
3	Surahmawati M., S.H.	19851128.2008 05.2.001	III/b ke III/c	Panitera Pengganti	reguler	selesai

- Periode Oktober 2020

NO	NAMA / NIP	MUTASI GOL	JABATAN	JENIS	KET
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

2. Promosi

Pada Tahun 2020, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Maros Kelas IB, baik Hakim maupun pegawai yang mengalami promosi/mutasi jabatan (masuk/keluar) adalah sebanyak 19 (sembilan belas) orang, yaitu sebagai berikut:

	NAMA	NIP	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.	19630317.199203.2.002	Ketua PA Maros Kls. IB	Ketua PA Sungguminasa Kls. IB	Keluar
2	Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	19691001.199403.1.008	Wakil Ketua PA Maros Kls. IB	Ketua PA Limboto Kls. IA	Keluar
3	Drs. Muh. Arief M, S.H.	19590909.198603.1.006	Hakim PA Maros Kls. IB	Hakim PA Makassar Kls. IA	Keluar
4	Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.	19830222.200704.1.001	Hakim PA Maros Kls. IB	Wakil Ketua PA Masohi Kls. II	Keluar
5	Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.	19700714.200112.2.002	PP PA Maros Kls. IB	PP PA Makassar Kls. IA	Keluar
6	Dra. St. Syahribulan	19670515.199403.2.006	PP PA Maros Kls. IB	PP PTA Makassar	Keluar
7	Drs. Sahrul Fahmi, M.H.	19680910.199403.1.016	Wakil Ketua PA Donggala Kls. II	Ketua PA Maros Kls. IB	masuk
8	Nahrudin, S.Ag.	19731105.200003.1.001	Ketua PA Pandeglang Kls. II	Wakil Ketua PA Maros Kls. IB	masuk
9	Dr. H. Sukri Hc, M.H.	19670412.199303.1.012	Hakim PA Malang Kls. IA	Hakim PA Maros Kls. IB	masuk
10	Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.	19561231.198503.1.029	Hakim PA Banyuwangi	Hakim PA Maros Kls. IB	masuk

11	Dra. Hj. St. Masdanah	19591030.198903.2.001	Hakim PA Watampone Kls. IA	Hakim PA Maros Kls. IB	masuk
12	Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.	19840909.201101.1.017	Hakim PA Biak Kls II	Hakim PA Maros Kls. IB	masuk
13	Drs. M. Idris, S.H., M.H.	19641231.199403.1.050	Panitera PA Jayapura	Panitera PA Maros Kls. IB	masuk
14	Muhammad Ridwan , S.H.	19900518.201212.1.004	PP PA Maros Kls. IB	Panmud Permohonan PA MarosKls. IB	Promosi
15	Nurwati, S.H.	19720203.199503.2.001	PP PA Sidrap Kls. II	PP PA Maros Kls. IB	masuk
16	Rima Arisanty	19780327.200904.2.005	Jurusita Pengganti PA Makassar Kls. IA	Jurusita PA Maros Kls. IB	masuk
17	Nurmala Sari, S.H.I.	19820207.201101.2.010	Analisis Peradilan PA Maros Kls. IB	Jurusita Pengganti PA Maros Kls. IB	Promosi
18	Muhammad Arsyuddin, S.Pi.	19730103.200604.1.003	Pengadimitrasi Persuratan PA Maros Kls. IB	Penyusun Laporan Keuangan PA Maros Kls., IB	Promosi
19	A. Muhammad Aslam	19831120.201508.1.001	Staf DPRD Kab. Maros	Pengelola Kepegawaiana PA Maros Kls. IB	masuk

3. Pensiun

Untuk tahun 2020 tidak terdapat pegawai yang pensiun pada Pengadilan Agama Maros.

4. Pendidikan dan Latihan

a. Tenaga Teknis (Fungsional)

Pendidikan dan latihan tenaga teknis selama tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Diklat “MA bekerja Dengan Media:”, oleh Muh. Arief Ridha, S.H,M.H (Hakim), Virtual, 5 Oktober 2020.
2. Diklat “Bimbingan Teknis Kepaniteraan”, oleh Muhammad Ridwan, S.H (Panitera Pengganti), Virtual, 23 s/d 25 September 2020.

b. Tenaga Non Teknis (Struktural)

Pendidikan dan latihan tenaga non teknis selama tahun 2020 tidak ada.

BAB IV

KEUANGAN, SARANA PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Maros Kelas IB mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu:

- SP DIPA-005.01.2.307445/2020 tanggal 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 7.247.0003.000,- (*Tujuh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ribu rupiah*).
- SP DIPA-005.04.2.309069/2020 tanggal 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 68.910.000 (*Enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Alokasi anggaran tersebut diatas diperuntukan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama;
3. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

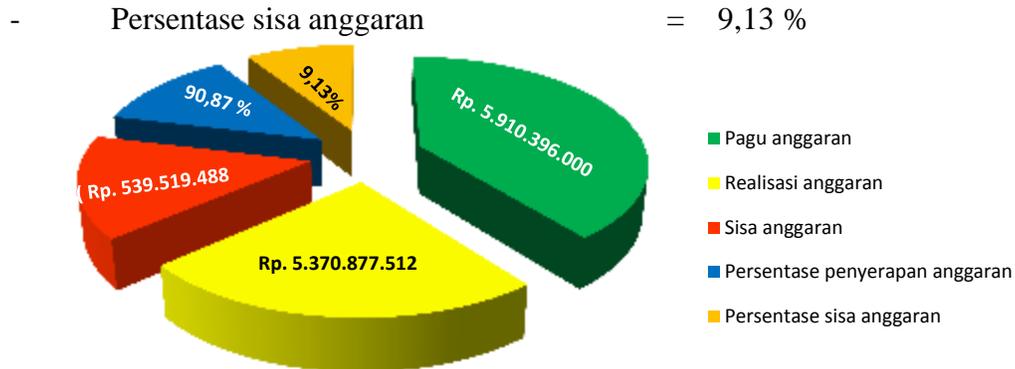
Anggaran dari masing-masing program tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Sampai akhir tahun 2019, kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros secara mikro dapat digambarkan sebagai berikut:

DIPA 01 MELIPUTI:

1) Belanja Pegawai

Kondisi riil pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros pada sektor belanja pegawai pada tahun 2019 adalah:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Pagu anggaran sebesar | = Rp. 5.910.396.000,- |
| - Realisasi sebesar | = Rp. 5.370.877.512,- |
| - Sisa Anggaran sebesar | = Rp. 539.518.488,- |
| - Persentase penyerapan anggaran | = 90,87 % |



Dari tabel diatas, diketahui terdapat sisa anggaran sebesar 9,13 %. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi Covid19 yang bersefek pada fluktuatifnya ketersediaan dan realisasi anggaran dimaksud, serta berlebihnya anggaran tunjangan hakim dan Aparatur Sipil Negara lainnya terkait dengan mutasi (masuk/keluar) di Pengadilan Agama Maros Kelas IB.

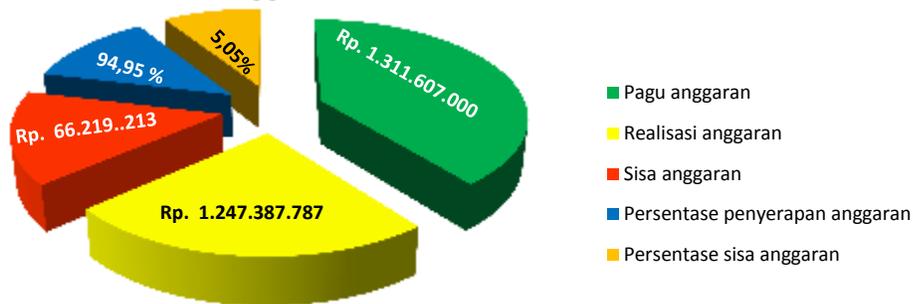
Dengan ini disampaikan pula, bahwa tahun 2020 untuk belanja pegawai, terdapat pengembalian gaji dan tunjangan-tunjangan salah seorang Hakim sebagai akibat dari penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah, dimana akun pengembalian tersebut melalui aplikasi SIMPONI sejumlah Rp. 38.279.002, dengan rincian sebagai berikut;

No	AKUN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	425911	Penerimaan kembali belanja pegawai tahun yang lalu.. ((Pengembalian gaji pegawai dari bulan April 2018 s/d Desember 2019)	25.829.440.-
2	511111	Pengembalian belanja pegawai (Gaji Pokok) Januari 2020 s/d November 2020	1.974.700.-
3	511122	Pengembalian belanja ppegawai (Tunj. Anak) Januari 2020 s/d November 2020	74.862.-
4	511124	Pengembalain belanja pegawai (Tunj.Jabatan) Januari 2020 s/d November 2020	10.400.000.-

2) Belanja Barang Operasional

Kondisi riil pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros pada sektor belanja barang operasional pada tahun 2020 adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 1.311.607.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 1.247.387.787,-
- Sisa Anggaran sebesar = Rp. 66.219.213,-
- Persentase penyerapan anggaran = 94,95 %
- Persentase sisa anggaran = 5,05 %

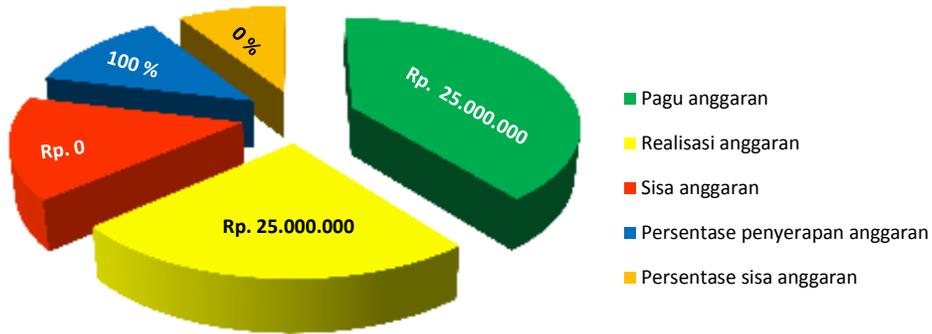


Dari statistik tersebut, realisasi anggaran untuk belanja barang operasional terlihat masih cenderung tinggi jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa mata anggaran yang kurang maksimal karena adanya Covid19 selama kurun waktu TA. 2020, khususnya belanja jasa langganan listrik dan perjalanan dinas biasa. Belanja jasa listrik karena kurang terpakai aliran listrik karena Covid19 sehingga terkadang terjadi sistem kerja WFH (*Work From Home*), serta perjalanan dinas tidak maksimal karena adanya Covid19 dengan sistem *Lockdown* dan PSBB lokal di sekitaran Kota Makassar dan sekitarnya sehingga mempengaruhi kegiatan yang sifatnya melakukan perjalanan dinas, seperti konsultasi, koordinasi, rapat koordinasi wilayah dan lain sebagainya.

3) Belanja Modal

Pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros pada sektor belanja barang modal tahun 2020 adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 25.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 25.000.000,-
- Sisa Anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran = 100 %
- Persentase sisa anggaran = 0 %



Neraca SAIBA dan Neraca SIMAK

Laporan Neraca pada aplikasi SAIBA dan Neraca aplikasi SIMAK, adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2020 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : 55A03B Tanggal : 31/12/21 Tahun : 1
KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA :	000 MAHKAMAH AGUNG	
UNIT ORGANISASI :	01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI	
WILAYAH/PROVINSI :	1000 SULAWESI SELATAN	
SATUAN KERJA :	307445 PENGADILAN AGAMA MAROS	
JENIS KEWENANGAN :	1 KD KANTOR DAERAH	

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
Persediaan	113,000
JUMLAH ASET LANCAR	113,000
ASET TETAP	
Tanah	4,257,130,000
Peralatan dan Mesin	2,020,250,507
Gedung dan Bangunan	7,740,323,000
Jalan, Jembatan dan Jembatan	30,000,000
Aset Tetap Lainnya	10,200,000
Akumulasi Penyusutan	(2,380,404,310)
JUMLAH ASET TETAP	11,662,104,700
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	20,345,000
Aset Lain-lain	1,200,000
Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Aset Lainnya	(27,620,000)
JUMLAH ASET LAINNYA	0
JUMLAH ASET	11,662,304,700
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	32,200,672
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32,200,672
JUMLAH KEWAJIBAN	32,200,672
EKUITAS	
Ekuitas	11,630,104,027
JUMLAH EKUITAS	11,630,104,027
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,662,304,700

Ag. MH
31 Desember 2020
Kepala Pengawasan Anggaran
19730451999031020

Pada Neacara diatas, tergambar adanya utang ke pihak ketiga selama 2020 yang rician seperti dalam uraian dibawah ini. Utang tersebut dibayar pada bulan Januari 2021.

BELANJA YANG DI AKRUALKAN DI JANUARI 2021	
LISTRIK DESEMBER 2020	: Rp. 6.992.346
TELPON DESEMBER 2020	: Rp 51.926
AIR DESEMBER 2020	: 472.200
KGB 2020	: Rp. 799.200
UANG MAKAN DESEMBER 2020	: Rp. 23.885.000

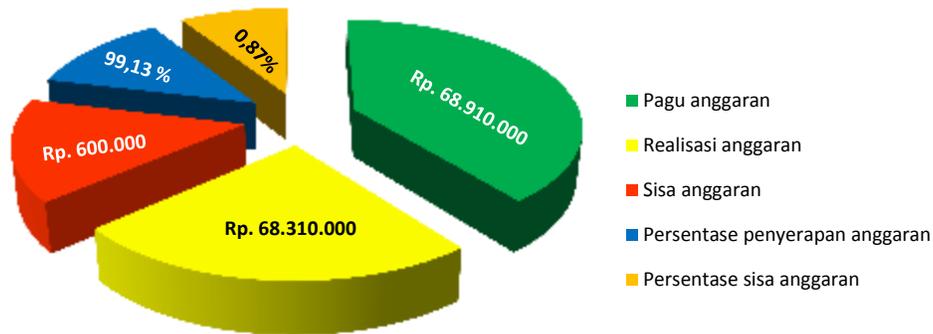


KASUBBAG UMUM & KEUANGAN
MAROS
MUKARRAMAH, S.HI
Nip. 19841104.200904.2.009

DIPA 04

Kondisi riil pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Maros untuk DIPA 04 tahun anggaran 2020 yang merupakan jenis belanja barang adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| - Pagu anggaran sebesar | = Rp. 68.910.000,- |
| - Realisasi sebesar | = Rp. 68.310.000,- |
| - Sisa Anggaran sebesar | = Rp. 600.000,- |
| - Persentase penyerapan anggaran sebesar | = 99,13 % |
| - Persentase sisa anggaran sebesar | = 0,87 % |



Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa secara umum realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Maros untuk tahun anggaran 2020 cukup optimal, namun terjadi sisa anggaran beraitan dengan belanja jasa Pos Bantuan Hukum, dimana total jumlah jam kerja Posbakum tidak relevan dengan total anggaran yang tersedia untuk Posbakum dimaksud.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012, Pengadilan Agama Maros selama Januari s/d Desember 2020 telah melakukan pungutan kepada pihak-pihak berperkara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berkaitan dengan proses perkara (dari menerima s/d menyelesaikan perkara) total jumlahnya sebesar Rp. 93.188.000 (*Sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)-. PNBP tersebut telah disetor ke Kas Negara sesuai akun pendapatan dan dilaporkan setiap bulan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta.

PENDAPATAN HIBAH

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Maros menerima hibah dalam bentuk peralatan dan mesin, dengan nilai kapitalisasi sejumlah Rp. 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*).

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Maros Kelas IB pada tahun 2020, adalah meliputi tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya, seperti terurai pada tabel dibawah ini:

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	3	
7	Ruang Kesekretariatan	1	
8	Ruang Kejurusitaan	1	
9	Ruang Sidang	2	
10	Ruang Mediasi	1	
11	Ruang rapat Ketua	1	
12	Ruang pelayanan perkara	1	
13	Ruang tunggu sidang	1	
14	Ruang arsip perkara	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Mushallah	2	Lt.1 & Lt. 2
17	Ruang bermain anak	1	
18	Ruang Server	1	
19	Gudang ATK	1	
20	Kamar mandi	11	Lt.1 & Lt. 2
21	Pos Satpam (Non permanen)	1	

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Selama kurun waktu tahun 2020, tidak ada pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Maros Kelas IB.

b) Pemeliharaan

Obyek pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor Pengadilan Agama Maros tahun 2020 adalah pemeliharaan gedung kantor, yaitu renovasi ruangan pelayanan PTSP, renovasi ruang Dekorum (ruang sidang I dan ruang sidang II, peenataan parkir roda 2 untuk pencari keadilan,

perbaikan atap kantor, dan lain sebagainya. Termasuk juga pengecatan pagar, dan penataan halaman/taman.

c) Penghapusan.

Selama kurun waktu 2020, Pengadilan Agama Maros Kelas IB tidak melakukan kegiatan penghapusan.

2. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a. Pengadaan

Pada tahun 2020 terdapat pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor Pengadilan Agama Maros Kelas IB yang bersumber dari DIPA TA. 2020, yaitu: Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa Personal Computer (PC) Kepaniteraan sejumlah 2 (dua) unit.

b. Pemeliharaan

Selama kurun waktu 2020, telah dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor berupa barang-barang inventaris meliputi peralatan dan mesin. Kendaraan Roda 4 ada 3 (tiga) unit, yaitu 2 (unit) adalah “hak milik” Mahkamah Agung RI dan 1 (satu) unit adalah “hak pakai” atau pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Maros. Sementara untuk roda 2 sebanyak 8 (delapan) unit, serta beberapa alat pengolah data (Air Conditioner, Notebook, PC, Printer, dan lain-lain).

c. Penghapusan

Kegiatan penghapusan terhadap sarana prasarana dan fasilitas perkantoran Pengadilan Agama Maros Kelas IB tahun 2020 tidak ada.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi *e-court*

Layanan perkara melalui sistem *e-court* pada Pengadilan Agama Maros Kelas IB tahun 2020 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) perkara. Proses peradilan dengan sistem *e-court* tersebut telah bisa diakses oleh para pihak/masyarakat secara umum.

2. Implementasi SIPP

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Maros Kelas IB sebagai salah satu entitas berada dibawah Mahkamah Agung RI telah mengelola Teknologi Informasi berupa SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terkoneksi secara integral dan sistemik, yaitu kesatuan sistem kerja SIPP terhadap tugas para Hakim, Kepaniteraan, dan Kejurusitaan, dalam menyelesaikan perkara. Predikat terakhir (berdasar data Badilag per 6 Nopember 2020) berada di peringkat ke 10 dari 89 Pengadilan Agama untuk kategori III (1001-2500 perkara).

Adapun sarana dan prasarana terkait dengan SIPP yang tersedia saat ini ini adalah:

1) Perangkat Keras (*Hardware*)

Dalam rangka penguatan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Maros, maka sarana dan prasarana yang menjadi perangkat keras (*Hardware*) yang tersedia adalah:

- Komputer (P.C unit) sebanyak 27 unit
- Laptop sebanyak 20 unit.
- Printer sebanyak 20 unit

2) Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak (*software*) yang tersedia di Pengadilan Agama Maros adalah meliputi:

- a. Sistem operasi computer yang digunakan adalah W indows XP dan Windows 7, Windows 10
- b. Aplikasi umum yang terpasang dan digunakan di *client* adalah:
 - Web Browser, yaitu : FIREFOX, GOOGLE CHROME
 - PDF Reader, yaitu: ACROBAT READER
 - Office, yaitu: Microsoft Office 2003 dan Microsoft Office 2007,
 - Kompresi, yaitu: WINRAR dan WINZIP
 - Antivirus, yaitu: SMADAV, NORMAN, NORTON, dan lain-lain.

c. Aplikasi khusus yang terpasang dan digunakan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan di Pengadilan Agama Maros adalah:

1) Administrasi perkara adalah:

- Aplikasi *e-court*, yaitu proses berpekara secara *online*
- Aplikasi *e-Litigacy*
- Aplikasi SIPP, Yaitu jenis Aplikasi web Based;
- Aplikasi SIWAS, Yaitu jenis Aplikasi Web Based.

2) Administrasi Keuangan adalah:

- Aplikasi SPM, yaitu jenis Aplikasi berupa Stand Alone
- Aplikasi GPP
- Aplikasi SILABI
- Aplikasi *e-rekon*
- Aplikasi SPRINT
- Aplikasi SIMPONI
- Aplikasi SAIBA, yaitu jenis Aplikasi berupa Stand Alone
- Aplikasi Monev Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian / SDM adalah:

- Aplikasi SIKEP, yaitu jenis Aplikasi berupa Web Based
- Aplikasi KOMDANAS
- Aplikasi ABS BADILAG, Yaitu jenis Aplikasi berupa Web Based

4) Administrasi Aset adalah:

- Aplikasi SIMAK BMN, yaitu jenis Aplikasi berupa Stand Alone.
- Aplikasi PERSEDIAAN, yaitu jenis Aplikasi berupa Stand Alone.
- Aplikasi SIMAN, Yaitu Jenis Aplikasi berupa Web Based

5) Administrasi Perencanaan Anggaran adalah:

- Aplikasi RKA-KL, yaitu jenis Aplikasi berupa Stand Alone
- Aplikasi SIRUP LKPP;
- LPSE;

Sementara media informasi lainnya yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder/publik mengenai kondisi Pengadilan Agama Maros adalah melalui website Pengadilan Agama Maros.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2918/DJA/OT.01.3/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018, perihal "*Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama*", Pengadilan Agama Maros sejak saat itu telah melaksanakan beberapa hal terkait, baik penataan dokumen maupun perbaikan beberapa sarana dan prasarana perkantoran sesuai dimaksud surat tersebut diatas.

Sebagaimana diketahui bahwa ada 7 (tujuh) kriteria *Indonesia Court Performance-Excellent (ICP-E)* yang perlu di pedomani dan dilaksanakan berkaitan dengan Akreditasi Penjaminan Mutu, yaitu:

1. Kepemimpinan (*Leadership*);
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*);
3. Fokus Pelanggan (*Costumern Focus*);
4. Sistem Dokumen (*Document System*);
5. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*);
6. Manajemen Proses (*Proses Management*) dan
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Sehubungan 7 (tujuh) kriteria tersebut, Pengadilan Agama Maros Kelas IB telah berupaya mensosialisasikan, merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikannya secara maksimal terhadap 7 (tujuh) kriteria diatas. Namun semua itu tidak lepas dari kekurangan, yang untuk itu segera diperbaiki.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Assesor Internal (Tim Assesor Pengadilan Agama Maros) dan diakhiri dengan penilaian dari Tim Assesor Eksternal (Badan Peradilan Agama MA.RI) pada bulan September 2020, maka diputuskan dan ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Maros Kelas IB mendapatkan

nilai maksimal, yaitu “ *A Excellent*”). Adapun proses dan eviden sertifikat/piagam Akreditasi Penjamin Mutu seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Maros Kelas IB adalah bentuk pelayanan satu meja kepada masyarakat umum dan para pencari keadilan berkaitan dengan proses berperkara maupun dengan pelayanan umum berkaitan tugas dan fungsi, serta kompetensi Pengadilan Agama Maros, baik pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), transaksi Bank (pembayaran biaya perkara), PT.Pos (legalisasi surat/dokumen perkara), dan lain-lain.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah salah satu hal terpenting dalam Reformasi Birokrasi, yaitu dengan melaksanakan perubahan-perubahan dalam bentuk dan proses pelayanan publik yang lebih smart, efektif, dan efisien. Hal ini jelas ditaur dalam Peraturan MenpanRB Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenpanRB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik dimaksud, Pengadilan Agama Maros Kelas IB terus berupaya melakukan inovasi dimaksud. Salah satunya adalah dengan menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang ditujukan untuk pelayanan masyarakat dan/atau pencari keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta proses pelayanan publik yang adil, tertib, efektif, dan akuntabel. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros Kelas IB berkaitan dengan pelayanan publik adalah:

1. Mesin antrian sidang;
2. PTSP Online yang nyaman dan asri;
3. Layanan Perbankan;
4. Layanan PT. Pos;
5. Audio visual keadaan perkara/persidangan;
6. Aplikasi Dinas Dukcapil Pemkab Maros atas pencatatan Akta Cerai ASN Pemda Maros;
7. Dan sarana teknologi informasi lainnya (Website, dan lain-lain)

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka selama tahun 2020 pelaksanaan pengawasan internal (reguler) di Pengadilan Agama Maros Kelas IB telah dilaksanakan, baik oleh Pimpinan/Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maros, maupun oleh Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

1. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maros

Ketua Pengadilan Agama Maros Kelas IB telah menugaskan Hakim pengawas bidang untuk melaksanakan pengawasan sesuai tugas masing-masing, dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Maros.

Hasil pengawasan oleh Hakim pengawas bidang tersebut, dilakukan secara regular dan periodik setiap Triwulan (empat triwulan) selama kurun waktu tahun 2020. Secara umum, hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap pejabat dan/atau aparatur negara lingkup Pengadilan Agama Maros Kelas IB adalah baik, namun dalam beberapa hal masih perlu perbaikan agar ke depan nanti mencapai hasil yang lebih baik dan maksimal.

Adapun hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti ditingkat unit masing-masing, baik teknis yudisial maupun non-yudisial, yaitu.

a. Teknis Yudisial (Administrasi Keperkarahan)

- Peningkatan pelayanan perkara yang lebih baik dan lebih cepat lagi (*one day one publish, one day one minute*);
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar petugas PTSP dan unit terkait di internal Pengadilan Agama Maros;

- Peningkatan waktu penyelesaian dan keakuratan data pada berita acara sidang, konsep putusan, dan relas panggilan guna mendukung ketepatan waktu dan keakuratan data pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP);
 - b. Teknis Non Yudisial (Administrasi Kesekretariatan)
 - Perencanaan, TI, dan Pelaporan
 - Peningkatan sistem evaluasi kebutuhan anggaran;
 - Peningkatan sistem informasi dan koordinasi perencanaan kebutuhan anggaran Pengadilan Agama Maros secara;
 - Peningkatan kearsipan pelaporan secara periodik;
 - Peningkatan pembaharuan data dan dokumen terkait APM;
 - Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana
 - Peningkatan disiplin (adm/absen) datang/pulang dan keluar kantor ;
 - Peningkatan ketertiban tatakelola data kepegawaian, LHKPN/LHKASN, dll ;
 - Peningkatan pembaharuan data dan dokumen terkait APM
 - Umum dan Keuangan
 - Peningkatan ketertiban dan kerapian tatakelola Barang Milik Negara;
 - Melakukan evaluasi BMN yang sudah tidak layak digunakan, untuk selanjutnya dilakukan proses penghapusan;
 - Intens melakukan komunikasi konstruktif dengan Kasubbag Perencanaan terkait kebutuhan BMN;
 - Peningkatan ketertiban dan kearsipan tatakelolah APBN, hibah, dan lain-lain;
 - Peningkatan pembaharuan data dan dokumen terkait APM.
2. Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Tahun 2020, Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Hakim Tinggi Pengawas telah melakukan pengawasan ke Pengadilan Agama Maros, baik di bulan

Maret 2020 maupun di bulan September 2020. Secara keseluruhan, hasil pengawasannya tidak menemukan hal-hal yang sifatnya urgen/prinsipil dalam bentuk pelanggaran, namun secara teknis masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sedangkan tindaklanjutnya telah dilakukan oleh seluruh entitas Pengadilan Agama Maros sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Evaluasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab seluruh entitas Pengadilan Agama Maros Kelas IB selama tahun 2020 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan dan Akreditasi Penjaminan Mutu, serta standar dalam Zona Integrtas. Namun tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan sebagai bahan perbaikan dan mbenahan secara konstruktif, sistemik dan terstruktur, sehingga mencapai hasil yang baik dan maksimal di kemudian hari.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dilakukan beberapa evaluasi secara menyeluruh terkait dengan hasil monitoring dan pengawasan dengan melakukan perbaikan-perbaikan, baik yang sifatnya teknis maupun nonteknis, yang secara umum sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

Meningkatkan standarnisasi pelayanan, yaitu dengan berupaya terpenuhinya ketersediaan sistem teknologi informatisi yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, seperti ketepatan waktu dan keakuratan data pada pelayanan PTSP, akuntabilitas dan transparansi pada Informasi dan Meja Pengaduan, layanan Posbakum, SIPP, SIWAS, dan lain-lain, termasuk *e-court* dan *e-Letigasi*.

2. Bidang Administrasi Perkara

Meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam hal substansi dan standarnisasi yuridik terhadap tatakelolah perkara (berkas perkara, berita acara, putusan, relass, akta cerai, dan lain-lain), baik oleh Hakim dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara, Panitera/Panitera

Pengganti dalam membuat Berita Acara Persidangan sampai dengan Minutasi perkara, serta Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melaksanakan sampai dengan menyelesaikan proses relas panggilan, pemberitahuan isi putusan atau tugas kejurusitaan lainnya.

Salah satu yang mempengaruhi hal diatas adalah minimnya pelaksanaan/keikutsertaan diklat teknis (termasuk Diklat Ditempat Kerja/DDTK) terkait keperkaraan, baik oleh Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, maupun Jurusita/Jurusita Pengganti.

3. Perencanaan, TI dan Pelaporan

Perencanaan anggaran lebih ditingkatkan secara quantity sesuai tingkat kebutuhan rill organisasi dan kebutuhan pegawai, dengan diawali melalui sistem RKBMN (Rencana Kegiatan Belanja Barang Mikik Negara), dan juga melalui penyusunan program kerja secara tahunan. Sistem Teknologi Informasi Pengadilan Agama Maros lebih ditingkatkan sesuai ketentuan yang ada, baik berupa Website, aplikasi SIPP, dan lain-lain, bahkan aplikasi *e-court (e-court)* telah aktif.

Adapun pelaksanaan pelaporan terhadap capaian kerja, baik terhadap tugas dan fungsi di bidang teknis yudisial maupun non-yudisial lebih ditingkatkan ketepatan waktu dan kearutan data sesuai sistem aplikasi pelaporan yang ada, baik secara *hard copy* maupun *soft copy*.

4. Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

Manajemen kepegawaian di Pengadilan Agama Maros telah berjalan dengan menggunakan aplikasi SIKEP versi 3.1.0. SIKEP yang ada hari ini masih terbatas pada informasi data kepegawaian masing-masing pegawai, belum beroritenasi pada sistem yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya pada lembaga negara lainnya yang saling berkaitan

5. Administrasi Umum dan Keuangan

Proses penghapusan terhadap BMN dengan kualifikasi “rusak berat” telah selesai dilaksanakan, dan oleh karena itu dibutuhkan lagi sarana prasarana yang

baru sesuai standar APM. Peningkatan tertib administrasi persuratan, yaitu kualifikasi kearsipan setiap surat yang masuk/keluar sesuai substansi surat tersebut, hal ini disebabkan salah satunya adalah tidak adanya staf dan kurangnya lemari arsip di subbagian umum. Dibutuhkan peremajaan sarana perkantoran (lemari, kursi dan meja kerja, dan lain-lain. Tatakelolah keuangan pada prinsipnya telah berjalan semestinya, namun perlu meningkatkan ketertiban dan koordinasi.

BAB VII

PEN UTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Maros Kelas IB dari tahun ke tahun telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai kegiatan dan pembaharuan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi di bidang tatakelola teknis yudisial (keperkaraan) maupun non-yudisial (kesekretariatan), termasuk juga peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut semuanya merupakan implementasi konkrit dari amanat reformasi birokrasi.

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Maros Kelas IB semakin berkembang, baik pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun dukungan teknologi informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara prima, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sehubungan dengan uraian diatas, dalam kurun waktu tahun 2020, beberapa hal dapat di simpulkan, yaitu:

1. Pelayanan Publik

Sarana prasarana (berupa CCTV) masih sangat kurang, sehingga berefek pada tingkat kemananan dan monitoring berkaitan dengan bahan pengawasan, penilaian dan evaluasi. Kemudian keberadaan sarana Pos Satpam yang belum standar dan representatif, sehingga perlu untuk di benahi sesuai standar yang berlaku.

2. Teknis Yudisial (Keperkaraan)

Secara umum telah berjalan baik dan maksimal, namun dalam beberapa hal khususnya terkait dengan sistem pelayanan publik perlu senantiasa dilaksanakan secara konsisten dan/atau *sustainable* sesuai ketentuan yang ada, seperti layanan PTSP, pelaksanaan SIPP, dan sarana & prasarana APM, yang secara sistemik telah berjalan namun perlu dilaksanakan secara lebih baik lagi dan berkesinambungan (*sustainable*).

3. Teknis Non Yudisial (Kesekretariatan)

Pelayanan dukungan (*supporting unit*) oleh bidang kesekretariatan secara umum telah berjalan baik dan maksimal. Tetapi dari beberapa hal perlu ditingkatkan lagi, khususnya terkait dengan tertib tatakelolah perencanaan agar lebih akomodatif, tatakelolah kepegawaian dan Ortala agar lebih tertib dan disiplin, tatakelolah sarana dan prasarana lebih ditingkatkan sistem pemeliharaan dan identifikasi kebutuhan kantor/masing-masing pegawai, serta tatakelolah keuangan agar lebih efektif dan efisien,

B. Rekomendasi

Berbagai capaian Pengadilan Agama Maros yang terurai diatas, tentunya masih terdapat beberapa hal yang merupakan kekurangan yang tidak prinsipil namun perlu perbaikan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam rangka memehuni hal tersebut, maka Pengadilan Agama Maros Kelas IB merekomendasikan beberapa hal:

1. Mengharapkan pimpinan Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan agar memperhatikan alokasi anggaran terkait dengan pengadaan sarana CCTV, termasuk juga keberadaan Pos Satpam agar diberikan dana belanja modal.
2. Teknis Yudisial (Keperkarahan)

Sumber Daya Manusia dan dukungan sarana prasarana (alat pengeloaah data, peralatan dan mesin, meubelair, dan lain-lain) perlu diperhatikan dan ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. Intensitas kegiatan pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan dan tingkatkan dalam rangka mendukung kompetensi teknis dan manajerial. Hal ini penting karena sebagai sumber utama dari pelaksanaan sistem pelayanan publik secara baik, maksimal, dan *sustainable*.

3. Teknis Non Yudisial (Kesekretariatan)

Inovasi pelayanan publik dari sisi ketersediaan dukungan budget dan sarana prasarana perlu dilakukan peremajaan dan mendapat perhatian ekstra untuk diadakan dan dianggarkan lebih proporsional. Karena tingkat keberadaan

(*representative*) sarana prasarana secara langsung berdampak sistemik pula terhadap fungsi-fungsi *supporting unit* berkaitan dengan proses-proses perkara, khususnya dukungan pelayanan publik bagi masyarakat umum/pencari keadilan. Sarana prasarana tersebut antara lain; alat pengolah data, meubelair, Air Conditioner, dan sarana pendukung lainnya.